

Daftar Pustaka

Bagus Rahmadi Supancana, Ida. *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2006.

HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta Timur: 2012

_____. *Hukum Pertambangan Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2012

Rokhmatussa'dyah, Ana, Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.

Soedjono Dirjo Sisworo. *Hukum Perusahaan mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung: 1999

Djafar Saidi Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013

Pramono Hariadi, Yanuara E. Restianto, Icut Rangga Bawono. *Pengelolaan Keuangan daerah. Salemba Empat*. Jakarta. 2010.

Said. Natzir. *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia ditinjau dari Segi Hukum Perusahaan*. Alumni. Bandung. 1985

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Kompas Gramedia. Jakarta. 2013

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta. 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral Batu Bara

Peraturan Pemerintah No, 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak
Dan Gas Bumi

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha
Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178./PMK.01/2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah

Artikel dan Koran

Erani Yustika. *APBN dan Mandat Konstitusi*. Koran SIndo selasa tanggal 1 Juli
2014

Anonymous. *Ekonomi Indonesia Didominasi Asing*
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/23/07263157/Ekonomi.Indonesia.Didominasi.Asing>

Media online. NTB tak pakai APBD untuk beli 7% saham Newmont. Rabu, 16
November 2011 <http://industri.bisnis.com/read/20111116/44/53373/ntb-tak-pakai-apbd-untuk-beli-7-percent-saham-newmont>

Berita online. Keberpihakan Migas ke daerah, *Participating interest* atau Royalti?.
Tanggal 8 April 2013 <http://migasreview.com/keberpihakan-migas-ke-daerah-participating-interest-atau-royalti.html#sthash.x6MbCDuw.dpuf>

Lensa Indonesia. *Semua Fraksi Setuju Perda APBD 2014 Provinsi Jatim disahkan.* Tanggal 28 Oktober 2013

<http://www.lensaindonesia.com/2013/10/28/perda-apbd-2014-provinsi-jatim-disahkan.html>

Pusat Investasi Pemerintah <http://www.setjen.kemenkeu.go.id/Page/pusat-investasi-pemerintah>